

## **Forest Village Community (LMDH) Program Evaluation In Creating Sustainable Forest In District Randublatung Blora**

*By Akbar Nur Imam Rhomadhona*

### **Abstract**

Sustainable forest management is a system of management of the forest resources while preserving the forest as well as attention to social conditions and welfare of the surrounding community or the community itself. In sustainable forest management, promoting maintaining environmental conditions or forest ecosystems such as flora and fauna as well as the water source.

In sustainable forest management there are several parties involved in it, which involve Perhutani, social community, LMDH, as well as from external parties. LMDH itself was formed to as a bridge between the aspirations of the community forest with Perhutani. Perhutani act as policy and program makers to be executed in the system of sustainable forest management. Meanwhile, the external function is to provide empowerment training community already programmed by forestry. such as batik traning, snack made, and composting. In the Perhutani sustainable forest management and also LMDH own duty to make people aware of the importance of forest conservation. In order to achieve sustainable forest management need the cooperation of the parties involved so that later Perhutani obtain FSC certification for sustainable forest management. However, there are issues with its implementation faced the impact on the existence of programs that are not or have not been successfully executed. So we need to be able to improve program evaluation that will be made later.

Program evaluation is assessing or measuring the extent to which a program or design that can be executed. Or it could mean that the judge or review the programs that have been carried out to find out what deficiencies or constraints of these programs and then find the solution, so that future programs can run on target.

This research uses descriptive qualitative research method. The data collection techniques used to study the documentation and interviewing the parties involved, such as LMDH, society, and also Perhutani. LMDH and Perhutani as a key informant while supporting the community as informants.

The results of the study explained that Perhutani and LMDH in creating a sustainable forest management system is realized through three aspects of sustainable forest management includes aspects of social management, production management aspects, and aspects of environmental management. As each of these aspects has its own program. That is from the aspect of social governance in the form of skills training programs to the community. socialization importance of forest conservation. from the aspect of environmental management programs will provide outreach to the public awareness of the environment by not using toxic pesticides, replaced with natural pesticides. From the aspect of production management / economics program

involving the community in the process of forest production, and provide socialization regarding the obligation to use Personal Protective Equipment (PPE) in accordance with SOPs in production.

Keywords: LMDH, Sustainable Forest Management, Perhutani, Evaluation

## PENDAHULUAN

Isu global telah membawa bangsa Indonesia harus dan mau untuk bisa melakukan upaya yang maksimal dalam mencegah dan menjaga kelestarian hutannya hingga pada upaya penindakan yang berskala besar. Salah satu isu global yang paling diperhatikan oleh pergaulan dunia internasional adalah masalah lingkungan hidup. Salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah hutan. Alasan isu ini menjadi begitu penting dan segera harus ditangani dengan serius terutama oleh negara-negara yang masih memiliki sumber daya hutan yang luas. Bila mana sumber hutan yang masih terjaga itu semakin lama semakin berkurang yang dikhawatirkan adalah dampak yang ditimbulkan terhadap umat manusia seluruh dunia. Dampaknya, ada yang terasa secara langsung juga secara tidak langsung. Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara langsung, maupun intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.

Sumber Daya Alam ( SDA ) hutan dengan potensi manfaatnya *Tangible* dan *Intangible*, memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam menyediakan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu ( HHBK ), dan jasa lingkungan. Nilai manfaat hutan tidak hanya nilai manfaat ekonomi, tetapi nilai sosial dan perlindungan ekosistem. Peranan ekonomi kehutanan di tunjukan oleh kontribusi manfaat perusahaan hutan dalam peningkatan devisa,

penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin berkurangnya tutupan hutan mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia rentan terhadap bencana ekologis (*ecological disaster*) seperti bencana kekeringan, banjir dan tanah longsor.

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas ketiga di dunia dan ditempatkan pada urutan kedua dalam hal tingkat keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman hayati yang ada terdapat di bumi Indonesia meliputi: 10 persen spesies tanaman berbunga, 12 persen spesies mamalia, 16 persen spesies reptilia dan amfibia, 17 persen spesies burung, serta 25 persen spesies ikan yang terdapat di dunia.

Namun, potret keadaan hutan Indonesia dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial ternyata semakin buram. Kerusakan hutan di Indonesia masih tetap relatif tinggi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sektor kehutanan yang sangat pesat dan menggerakkan ekspor bagi perekonomian pada awal periode 1980-an sampai akhir 1990-an telah mengorbankan hutan karena kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali dan dilakukan secara masif tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan. Konsekuensinya, Indonesia menjadi negara emiter karbon terbesar ketiga di dunia akibat hilangnya hutan karena terjadinya alih fungsi lahan hutan, kebakaran hutan, serta penebangan yang eksploitatif dan tidak terkontrol<sup>1</sup>.

Tidak kalah penting untuk dapat mengembalikan fungsi hutan seperti semula adanya peran lembaga-lembaga terkait. Seperti halnya perkumpulan-perkumpulan masyarakat sekitar hutan yang bergerak peduli terhadap kondisi lingkungan dan ingin mengembalikan kondisi hutan menjadi lebih baik. Seperti halnya peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam menciptakan hutan lestari. Di mana dalam AD/ARTnya LMDH adalah lembaga yang merupakan berkumpulnya sekelompok masyarakat dan atau gabungan dan kelompok tani hutan yang beraktivitas dalam

---

<sup>1</sup> Diakses dari <http://green.kompasiana.com> tanggal 29-10-13 pukul 13.30 dalam Potret Kondisi Hutan Indonesia Periode 2000-2009 [Rep](#) 28 July 2011

kegiatan lingkungan hidup terutama pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dalam hal tersebut tentu saja disusunlah sebuah program dalam menciptakan hutan lestari agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya program yang dijalankan tidak berjalan sesuai rencana. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Dari hal diatas tersebut tergambar bahwa peran LMDH adalah melakukan pengelolaan hutan agar hutan tersebut dapat dipakai dengan efektif tidak berlebihan sehingga dapat terjaganya ekosistem hutan. Berdasarkan latar belakang diatas ada dua perumusan masalah yang akan diteliti yaitu: Bagaimana pelaksanaan program-program LMDH dalam menciptakan hutan lestari?Kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi LMDH dalam mencapai hutan lestari, program apa saja yang sekiranya perlu dilanjutkan dan yang perlu dibenahi agar dalam menciptakan hutan lestari dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang ada?

### **Evaluasi Program**

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *Evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran<sup>2</sup>.

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Dan penilaian yang bersifat kualitatif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh

---

<sup>22</sup> Echols, m, john, shadily, hassan, 2000. Kamus inggris-indonesia, jakarta:gramedia. Hlm 220

Arikunto<sup>3</sup> bahwa mengukur adalah, membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut diatas. Evaluasi program adalah menilai atau melakukan pengukuran sejauh mana suatu program atau rancangan yang dijalankan dapat dilakukan. Atau bisa diartikan bahwa menilai atau mengulas kembali program-program yang sudah dijalankan untuk mengetahui apa kekurangan atau kendala dari program-program tersebut untuk kemudian dicari solusinya, agar kelak program yang dijalankan dapat sesuai target.

Pengukuran evaluasi bervariasi sesuai dengan tipe evaluasinya. Walaupun pengukuran evaluasi bervariasi, secara umum kinerja evaluasi kinerja kebijakan tersebut mengacu pada empat indikator pokok, yaitu indikator *input*, *process*, *outputs*, dan *outcomes* (Brightman and Davis, 2000)<sup>4</sup>. Uraianannya sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*input*) memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang, infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses (*process*) memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator hasil (*out put*) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya beberapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator dampak (*outcome*) memfokuskan diri pada pertmnyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

---

<sup>3</sup> Arikunto, suharsimi, 2009, "prosedur penelitian suatu pendekatan praktik", jakarta: rineka cipta. Hlm 3

<sup>4</sup> Abdul kahar badjuri dan teguh yuwono kebijakan publik (konsep dan strategi) hlm 138

## **Partisipasi Masyarakat**

Pembangunan selama ini dipenuhi tarikmenarik antara masyarakat dengan pemerintah dalam menempatkan subjekdidalamnya. Pada masa lalu pemerintah menempatkan diri sebagai policy maker yang amat sentralistik dan masyarakat disubordinasikan dengan argumentasi stabilitas dan kelancaran prosesnya. Namun sejaak paradigma pembangunan partisipatif menguat dalam wacana publik telah menyadarkan perlunya kesepahaman dankesedrajan antara masyarakat dengan pemerintah sehingga menempatkan masyarakat tidak saja sebagai subjek namun sekaligus mitra pemerintah.

Menurut Eko Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat ternyata telah gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik dan social ekonomi masyarakat<sup>5</sup>.

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah campur tangan dari pihak penguasa.

Tingkat partisipasi seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki rasa kepedulian terhadap sesama dan rasa sosial yang tingg. Partisipasi sebenarnya sudah ada dalam kebiasaan masyarakat indonesia jaman dahulu kala yaitu gotong

---

<sup>5</sup> Diakses dari jurnal [http://eprints.undip.ac.id/17075/1/DIDI\\_PRAYITNO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17075/1/DIDI_PRAYITNO.pdf) pada tanggal 20-03-2014 pukul 08.00 dngan judul partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah (studi kasus pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di distrik semangga, kabupaten merauke) Didi Prayitno hlm 24

royong dan ronda malam. meski gotong royong memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap daerah namun hal tersebut tidak mengurangi makna dari gotong royong itu sendiri yaitu rasa kebersamaan dan saling peduli antar anggota masyarakat.

Pembangunan juga dipahami berkaitan dengan perubahan sosial, yang artinya pembangunan sebagai entitas yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah akan selalu bersentuhan dengan keberadaan masyarakat didalamnya. Dalam hal ini pembangunan juga membutuhkan partisipasi masyarakat baik sebagai stakeholders maupun subjek yang telah mempercayakan proses pembangunan pada pemerintah. Oleh sebab itu muncul pembangunan partisipatif sebagai pemikiran baru yang seharusnya diikuti pemerintah ketika berharap pembangunan benar-benar memperoleh dukungan masyarakat yang *favourable*. Pembangunan sudah semestinya ditempatkan kembali sebagai common interest antara masyarakat dengan pemerintah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif, sehingga peneliti dapat menjelaskan atau memberi gambaran bagaimana peran LMDH tersebut.. Untuk tipe penelitian, penulis menggunakan kualitatif-deskriptif dikarenakan (1) penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, (2) sikap dan pandangan yang menggejalakan saat sekarang, (3) hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, (4) pengaruh terhadap suatu kondisi, (5) perbedaan antar fakta, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan peneliti terdapat dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari peneliti berasal dari wawancara langsung dengan informan kunci adalah pihak perhutani dan juga LMDH sedangkan informan pendukung adalah masyarakat hutan. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa arsip, laporan, dan kajian pustaka

tentang pelaksanaan program-program pengelolaan hutan lestari yang dilakukan perhutani dan juga LMDH.

### **Hasil Penelitian**

Pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah selama ini dilakukan berdasarkan sumsi bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang harus diarahkan untuk dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi hutan. Dalam usaha pelestarian sumber daya alam tersebut merupakan kegiatan utama juga memelihara tata guna air, memperluas lapangan pekerjaan juga untuk menambah jumlah penadapatan Negara. Dalam masalah tersebut pemerintah dan masyarakat sekitar atau didalam hutan sangat strategis sebagai objek utama dalam pengelolaan hutan. Selain itu peningkatan hutan produksi dan juga hutan alam juga sangat perlu dilakukan untuk dapat menjaga kondisi hutan serta dapat meningkatkan produksi hasil hutan. Hutan rakyat juga dapat dikembangkan dengan penyediaan bibit bagi hutan yang baru dipanen serta penjagaan melalui reboisasi juga harus ditingkatkan guna untuk menjaga kondisi hutan apabila masyarakat melakukan pengambilan terhadap hasil atau sumberdaya hutan. Selain bahwa hutan harus dikelola untuk kemakmuran, hutan juga harus dijaga sebagai bagian dari integral ekosistem. Pengelolaan harus mampu untuk menjaga kondisi tanah, air, udara, iklim, dan lingkungan hidup. Setiap ada perubahan terhadap fungsi hutan juga harus diimbangi dengan perubahan atau pengalihan fungsi yang lain supaya kondisi hutan tetap lestari. Perum perhutani telah diberikan kewenangan sebagai pengelola kawasan hutan di Jawa dan Madura, yang

sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi. Sesuai dengan apa yang menjadi visi misi perhutani di mana perhutani ingin menjadi “pengelola hutan tropis terbaik dengan prinsip pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat”.

Seperti sudah diketahui diatas bahwa dalam pelaksanaan program tersebut perhutani berkerjasama dengan beberapa pihak yang membantu menciptakan pengelolaan hutan lestari itu sendiri. Baik dari LMDH, masyarakat, serta dari pihak eksternal. Maka dari itu bagaimana pelaksanaan program dalam menciptakan hutan lestari dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari mencakup 3 aspek yang harus dipenuhi yaitu aspek sosial, aspek lingkungan serta aspek produksi/ekonomi. Sehingga ke-tiga aspek tersebut harus dapat dikerjakan secara berdampingan, karena tiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan.

**A. Dalam Pelaksanaan Aspek Kelola Social Kegiatan Yang Dilakukan Adalah Berupa:**

1. Memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat, berupa pelatihan batik, pelatihan pembuatan snack/makanan ringan, pelatihan pembuatan kompos. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat dilanjutkan hanya pembuatan kompos dikarenakan kebutuhan akan pupuk pestisida alami banyak dibutuhkan masyarakat hutan. serta mudahnya mendapatkan bahan baku dari pupuk kompos itu sendiri. Sedangkan pembuatan batik dan pembuatan makanan ringan kurang begitu berhasil dikarenakan masyarakat tidak mengetahui

bagaimana cara memasarkannya, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat.

2. Selain itu LMDH juga mempunyai usaha produktif seperti, persewaan kendaraan, tenda, pengadaan pupuk bagi masyarakat, dan ada juga yang memiliki koperasi sendiri.
3. Adanya sosialisasi dari perhutani dan juga LMDH mengenai pentingnya kelestarian hutan bagi manusia dan juga makhluk yang lainnya.
4. Mengajak masyarakat serta anggota LMDH untuk mengikuti patroli hutan dengan memberikan upah tiap orang Rp800.000 per bulan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.

**B. Dalam Pelaksanaan Aspek Kelola Lingkungan Kegiatan Yang Dilakukan Adalah Berupa:**

1. Menjaga kondisi lingkungan hutan dengan menjaga sumber mata air yang ada, karena itu merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup.
2. Tidak menggunakan pestisida yang beracun. Hanya menggunakan pestisida yang diperbolehkan atau penggunaan pupuk kompos alami. Tidak membuang sampah pestisida atau sampah lain sembarangan. Serta menggunakan musuh alami dalam pemberantasan hama tanaman.

3. Merehabilitasi lahan yang kosong atau sudah tidak terpakai, supaya kondisi kesuburan tanahnya dapat terjaga.

**C. Dalam Pelaksanaan Aspek Kelola Ekonomi/Produksi Kegiatan Yang Dilakukan Adalah Berupa:**

1. Melibatkan masyarakat dalam proses produksi kayu atau melibatkan masyarakat dalam proses tebangan.
2. Mewajibkan pekerja untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti penggunaan helm pelindung kepala, sarung tangan, sepatu, celana anti gores.

Dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan pastilah tidak sepenuhnya dapat berjalan sesuai rencana. Pasti terdapat kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi. Begitu pula yang dialami oleh perhutani, dalam setiap melaksanakan program pasti ada kendala yang dihadapi oleh perhutani, seperti halnya:

1. Masyarakat yang apatis dengan apa yang menjadi kegiatan dari perhutani. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan yang sudah dibuat oleh perhutani.
2. Adanya masyarakat yang masih menggunakan B3 yang dilarang, yang mana hal tersebut dapat mencemari lingkungan.
3. Kurang adanya kepercayaan terhadap LMDH dalam penggunaan dana sharing dari perhutani.

4. Kurang paham dan pedulinya masyarakat mengenai kelestarian lingkungan.
5. Masih tingginya pencurian terhadap hasil hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

## **PENUTUP**

Perhutani sebagai pembuat program memerlukan bantuan LMDH dalam pelaksanaannya sehingga hal tersebut dapat membantu perhutani dalam melaksanakan program yang sudah dibuat. Selain itu LMDH juga merupakan objek atau sasaran dari program itu sendiri. Sehingga perhutani dan juga LMDH beserta masyarakat merupakan objek dari program yang dibuat oleh perhutani serta merupakan penentu keberhasilan dari program tersebut.

Menurut peneliti program yang dijalankan oleh perhutani untuk menciptakan pengelolaan hutan lestari sudah cukup berhasil, hal dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya beberapa program telah berhasil dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari pelibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan seperti, ikut melakukan penanaman, ikut serta dalam perawatan, keamanan, dan juga produksi. Dari LMDH sendiri juga sudah memiliki beberapa usaha sendiri dari hasil sharing yang sudah diberikan. Usaha yang di miliki antara lain penyewaan kendaraan, penyediaan pupuk. Ada juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan lahan kehutanan. Serta adanya

pemberian upah kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan.

Adapun dalam pelaksanaan program dari LMDH sendiri ada beberapa hambatan yang mengganggu pelaksanaan program tersebut. Hambatan atau kendala yang dihadapi biasanya berasal dari LMDH itu sendiri dan juga dari masyarakat. Dari LMDH sendiri kendala yang dihadapi adalah kurang adanya kepercayaan dari anggota LMDH itu sendiri. Sedangkan dari masyarakat kendala yang dihadapi berupa perbedaan karakter satu sama lainnya, sehingga cukup susah untuk menyatukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik (Konsep Dan Strategi)*. Semarang: Undip Press

Sukandar, Rumidi. 2006. *Metode penelitian: petunjuk praktis bagi peneliti pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

Tony, dkk. 2003. *Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre

Jurnal:

[http://eprints.undip.ac.id/17075/1/DIDI\\_PRAYITNO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17075/1/DIDI_PRAYITNO.pdf) pada tanggal 20-03-2014 pukul 08.00 dngan judul partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah (studi kasus pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di distrik semangga, kabupaten merauke) Didi Prayitno hlm 24

Diakses dari <http://green.kompasiana.com> tanggal 29-10-13 pukul 13.30 dalam Potret Kondisi Hutan Indonesia Periode 2000-2009 [Rep](#) 28 July 2011